

Saudi Vision 2030 dan Kebijakan Reformasi pada Kerajaan Arab Saudi

Anna Zakiah Derajat

*Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Kajian Timur Tengah
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Toni Kurniawan

Hukum Tata Negara, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

This paper aims to uncover problems related to Saudi Vision 2030 related to Wahhabiism in Saudi Arabia. This research is considered important because from several studies on the 2030 vision of Saudi Arabia itself, it is still too focused on micro-scale problems, so that there is no study related to how the application of the Saudi Arabian vision and Wahhabi ideology are contradictory because of different ideologies Wahhabi himself was so too conservative. In vision 2030, Saudi Arabia will also apply moderate Islamic understanding, for researchers this will be detrimental to the Wahhabi group, because the understanding that has long been rooted in Saudi Arabia will slowly be replaced by new understandings based on the reform policy in Saudi Vision 2030. Researchers use structural functional theory proposed by Talcott Parsons with the decision making process approach. This approach is used to present the focus of the study in reading how the influence of a group in state politics. because in deciding policies, the government of Saudi Arabia cannot stand alone because there is a group that has a role and influence in it.

Keywords: *Saudi vision 2030, reformation, Muhammad bin Salman, Wahhabi*

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap problematika terkait Saudi Vision 2030 yang berkaitan dengan paham Wahhabi yang ada di Arab Saudi. Penelitian ini dinilai penting karena dari beberapa kajian tentang visi 2030 Arab Saudi sendiri masih terlalu berfokus pada problem-problem dengan skala mikro, sehingga belum adanya kajian terkait bagaimana penerapan visi Arab Saudi dan paham Wahhabi yang saling bertentangan karena ideologi yang dibawa Wahhabi sendiri begitu terlalu konservatif. Dalam visi 2030 Arab Saudi juga akan menerapkan paham Islam moderat, bagi peneliti hal itu akan merugikan kelompok Wahhabi, karena paham yang sejak dulu sudah mengakar dalam diri Arab Saudi, perlahan akan tergantikan dengan paham baru berlandaskan kebijakan reformasi dalam Saudi Vision 2030. Peneliti menggunakan teori fungsional struktural yang digagas oleh Talcott Parsons dengan pendekatan decision making process. Pendekatan ini digunakan untuk menyuguhkan fokus kajian dalam pembacaan bagaimana pengaruh sebuah kelompok dalam suatu perpolitikan negara. Karena dalam memutuskan kebijakan, pemerintahan Arab Saudi tidak dapat berdiri sendiri karena ada sekelompok yang memiliki peran dan pengaruh di dalamnya.

Kata kunci: *Saudi vision 2030, reformasi, Muhammad bin Salman, Wahhabi.*

Pendahuluan

Sebagai negara yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai konstitusinya, Negara Arab Saudi memiliki konsekuensi adanya keterlibatan paham-paham dan para ulama Wahhabi di dalam pemerintahannya. Kelompok Wahhabi ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari keterlibatan dalam pemerintahan Arab Saudi, karena jika dilihat dari latar belakang historisnya, kelompok Wahhabi memiliki peran yang cukup penting dalam pendirian Negara Arab Saudi (M. Syafrizal Izaqi 2016, 388).

Hubungan antara Kerajaan Arab Saudi dan kelompok Wahhabi telah terjalin dan dapat dikatakan saling membutuhkan satu sama lainnya. Hubungan di antara keduanya inilah yang kemudian menentukan mobilitas Negara Arab Saudi itu sendiri. Sejak pemerintahan Arab Saudi berada di bawah kekuasaan Raja Abdul Aziz hingga saat ini, kelompok Wahhabi ikut turut serta melayani negara atau dapat disebut sebagai *stake-holder*, begitu pun sebaliknya para penguasa Kerajaan Arab Saudi akan melayani kelompok Wahhabi. Kelompok Wahhabi juga memiliki peran penting dalam membentuk sebuah kebijakan hukum negara. Adanya hubungan yang begitu erat antara Kerajaan Arab Saudi dan kelompok Wahhabi, tentu akan menghalangi adanya kebijakan reformasi yang akan dilakukan oleh Negara Arab Saudi.

Dalam membaca permasalahan *Saudi Vision 2030* dan kebijakan reformasi yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman pada Kerajaan Arab Saudi yang berhubungan dengan kelompok Wahhabi, peneliti akan menggunakan teori fungsionalisme struktural dengan pendekatan *decision making process*. Dalam hal ini, masyarakat merupakan bagian dari satu sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Bagian satu tidak akan berfungsi baik jika tidak memiliki bagian yang saling berhubungan dengan lainnya. Selain itu, adanya perubahan yang mendasar dari salah satu bagian dalam sistem tersebut akan berakibat terciptanya ketidakseimbangan, sehingga menciptakan perubahan-perubahan pada bagian yang lain (Francois Bourricaud 1984, 94). Dalam teori ini, perspektif fungsionalis dikatakan bahwa suatu masyarakatnya dilihat sebagai kelompok masyarakat yang saling bekerja sama secara terstruktur dan terorganisir, hal ini berdasarkan pada seperangkat nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Teori ini juga menilai bahwa masyarakat telah membentuk suatu sistem dengan tujuan untuk keberlanjutan sistem itu sendiri. Maka dari itu, hal yang demikian juga tengah terjadi di wilayah Arab Saudi, di mana hubungan Saudi dan kelompok Wahhabi saling memberikan dampak dalam sistem regulasi dan aristokrasi Arab Saudi.

Dalam hal ini, ada beberapa karya yang peneliti temukan sebagai sebuah perbandingan dalam penelitian. Dalam sebuah artikel, Citra Nur Hikmah, Abrar (2019) menjelaskan bahwa perekonomian Kerajaan Arab Saudi memang hanya bergantung pada sumber daya alamnya, yaitu minyak bumi. Sehingga, adanya Visi 2030 Arab Saudi karena adanya kekhawatiran akan terganggunya kelangsungan ekonomi Negara Arab Saudi dengan adanya ketidakstabilan harga minyak global.

Selain itu, Anis Rosida (2018) menyatakan bahwa sejak adanya visi 2030 Arab Saudi, pemerintahan tersebut terus berupaya untuk mengalihkan perhatian yang awalnya hanya pada sektor minyak menjadi ke beberapa sektor yang dianggap lebih menguntungkan. Dalam proses perubahan kebijakan ini, tentu akan banyak memakan waktu dan banyaknya perubahan-perubahan di Arab Saudi dalam berbagai bidang, seperti bidang politik, sosial, agama, budaya, dan ekonomi.

Kemudian, Ecaterina MATOI, Ph.D dan Diana-Monica CONSTANTIN (2019) menjelaskan bahwa adanya hubungan dan pemahaman antara kelompok Wahhabi dan keluarga Al-Saud telah melegitimasi untuk mengejar kebijakan ekspansionis dan menciptakan negara yang berkelanjutan pada awal abad ke-20. Maka dari itu, sistem monarki Arab Saudi berusaha untuk memonopoli aksi politik dan militer. Sedangkan, para ulama Wahhabi mengambil alih bidang agama, hukum, dan sosial di dalam pemerintahan Arab Saudi. Namun, dengan adanya reformasi yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman tentu sangat bertentangan dengan ideologi yang dibawa oleh kelompok Wahhabi.

Dari beberapa kajian yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa belum adanya satu kajian yang mengelaborasi antara pemahaman yang dibawa Wahhabi terhadap kebijakan *Saudi Vision 2030* secara lebih detail dengan menggunakan teori fungsional struktural. Oleh karena itu, artikel ini akan mengisi kekosongan dari artikel-artikel

sebelumnya. Pembahasan dalam artikel ini diarahkan pada bagaimana penerapan kebijakan *Saudi Vision 2030* akan mempengaruhi hubungan dan budaya masyarakat yang telah melekat dengan adanya ideologi Wahhabi di dalamnya. Selain itu, artikel ini juga menawarkan sebuah hipotesis bahwa adanya pergantian dan penerapan paham Islam moderat sebagai landasan yang mulai diterapkan di Arab Saudi akan menggeser paham Wahhabi yang telah mengakar di sana, sehingga adanya visi 2030 Arab Saudi ini secara perlahan akan melenyapkan sedikit demi sedikit kekakuan dari paham-paham beragama yang sudah ada.

Pembahasan

Empat Pilar Kenegaraan Arab Saudi

Adanya perubahan besar dalam sektor sosio-ekonomi dan demografi yang telah dilewati oleh Kerajaan Arab Saudi selama ini, ditambah dengan adanya gerakan revolusi politik yang terjadi di kawasan Timur Tengah atau yang disebut sebagai *Arab Spring*, Dinasti Saud secara argumentatif dapat dikatakan sebagai rezim yang paling stabil di kawasan Timur Tengah (Panji Haryadi 2018, 29). Menurut Stenslie (2018), adanya kontruksi dari Kerajaan Arab Saudi dikatakan bergantung pada empat pilar, yaitu *pertama*, adanya penyatuan beberapa klan yang dapat mempertahankan kekuatan keluarga Kerajaan Arab Saudi. Keluarga kerajaan Arab Saudi terkanal mampu untuk menyatukan berbagai klan selama berabad-abad, sehingga itulah yang menjadi kunci keutuhan rezim Saud tersebut. Walaupun adanya beberapa perseteruan, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk selalu mempertahankan kekuasaan yang ada—Dinasti Saud (Simon Henderson 1994).

Keluarga Saud mempunyai sejarah yang cukup panjang, sebelum akhirnya berkuasa dan menjelma sebagai negara. Tahun 1744, Muhammad bin Saud—seorang anak dari penguasa padang pasir di daerah Diriyah, menikah dengan seorang putri dari pembaharu agama, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Pemikiran yang dikembangkan oleh Wahhab ini, kemudian dikenal dengan paham Wahhabi dan menjadi paham yang dominan di Arab Saudi (E. Gearon 2016, 224). Keturunan dari hasil pernikahan antara anak Muhammad bin Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahhab memang terus berkembang, sehingga menciptakan berbagai klan yang saat ini berkuasa di Arab Saudi modern. Klan-klan yang terlahir di dalam Dinasti Saud inilah yang kemudian menjadi kunci dari bertahannya kekuasaan Dinasti Saud selama berabad-abad.

Kedua, adanya legitimasi Wahhabisme, yaitu aliran paham yang menjadi ideologi dari Kerajaan Arab Saudi. Sepanjang sejarah Dinasti Saud, para ulama Arab Saudi memiliki peran yang cukup penting. Pada awal mula pembentukan Dinasti Saud, Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahhab memutuskan untuk bekerja sama pada tahun 1744. Keduanya memiliki rencana untuk melakukan sebuah jihad dalam menaklukkan dan memurnikan kembali tanah Arab dari hal-hal yang *bid'ah*. Doktrin dari keduanya ini adalah siapa pun yang tidak menerima bahkan melanggar keras doktrin-doktrin dari penafsiran Wahhabi, maka harus dibunuh atau diasingkan dari tanah Arab (Simon Henderson 1994, 5).

Menurut Wagemakers (2012), doktrin Wahhabisme itu ada dua jenis, yaitu Wahhabi sosial dan Wahhabi politik. Wahhabi sosial sendiri merupakan suatu sikap yang lebih memilih untuk berdiam diri dan taat, jika berkaitan dengan berbagai urusan pemerintah. Kelompok ini hanya akan berfokus pada penyebarluasan paham-paham Wahhabi di masyarakat. Sedangkan, Wahhabi politik merupakan suatu sikap kritis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan atau kenegaraan. Jika melihat lebih jauh, tren yang berkembang saat ini di Kerajaan Arab Saudi adalah paham Wahhabi sosial. Namun, secara formalitas kelompok ini masih terlibat dalam suksesi kepemimpinan.

Ketiga, penjualan minyak yang besar. Tercatat pada tahun 1983, sebuah perusahaan AS, Chevron telah menemukan minyak di bawah gurun pasir Arab Saudi. Dan selama terjadinya Perang Dunia II, produksi minyak bumi sangat berkembang pesat. Namun, adanya pendapatan besar Arab Saudi dari sektor minyak bumi ini terjadi pada tahun 1973-1974, pada tahun tersebut dunia Barat sedang mengalami krisis minyak (EIA (Energy Information Administration 2017)). Hal ini akibat dari terjadinya perang antara Arab dan Israel. Pada saat itu, negara-negara Arab yang memang telah tergabung dalam *Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)* melakukan embargo minyak bumi kepada Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Barat yang memang mendukung Negara Israel. Oleh karena itu, akibat dari embargo ini harga minyak dunia naik hingga mencapai empat kali lipat dari harga normalnya. Jika diamati lebih lanjut, Arab Saudi sebagai negara yang sumber ladang minyaknya sangat besar, yaitu sekitar hampir seperlima dari cadangan minyak dunia, maka Arab Saudi sendiri memilih jalan untuk mengeksplor minyak bumi tersebut dan menjadi penghasil minyak terbesar dalam urutan kedua di dunia.

Negara Arab Saudi merupakan negara yang dapat dikatakan sebagai *rentier state* terbesar di dunia, karena Negara Arab Saudi menjadi negara yang pendapatan nasionalnya memang bergantung penuh atau sebagian besar berasal dari kekuatan sumber daya alam lokal negara tersebut. Selain itu, sumber pendapatan Kerajaan Arab Saudi ini berasal dari adanya penjualan minyak serta investasi luar negeri. Dan hanya sebagian kecil pendapatan Kerajaan Arab Saudi yang berasal dari pajak serta retribusi (S. Stenslie 2018, 66).

Keempat, adanya dukungan dan jaminan dari Amerika Serikat kepada rezim Arab Saudi dalam bidang keamanan. Hubungan antara Negara Arab Saudi dan Amerika Serikat memang begitu dekat dan saling ketergantungan. Faktor-faktor dominan yang menyebabkan ketergantungan tersebut adalah faktor keamanan, minyak, dan Islam. Negara Amerika Serikat (AS) sangat membutuhkan banyak sumber minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Sedangkan, rezim Saud sendiri membutuhkan AS untuk keamanan dan dukungan politik dari negara tersebut. Mengenai Islam sendiri, khususnya Islam versi Wahhabi, Amerika Serikat sendiri berupaya mendorong agar Arab Saudi terus memelihara budaya dan tradisinya, serta paham-paham yang ada di dalamnya, yaitu Wahhabisme. Namun, dari sisi lain, AS juga harus dapat memastika bahwa paham Wahhabi ini tidak akan mengganggu kekuasaan Dinasti Saud di kemudian hari (Simon Henderson 1994, 39). Bukan hanya itu saja, Arab Saudi juga menjadi mitra penting dalam bidang ekonomi bagi Amerika Serikat. Sedangkan, Amerika Serikat juga merupakan negara pemasok barang-barang impor terbesar kepada Kerajaan Arab Saudi, khususnya Amerika Serikat dalam pengimporan peralatan-peralatan militer.

Perekonomian Arab Saudi

Wilayah Timur Tengah yang menjadi sumber penghasil minyak menjadikan negara-negara di wilayah tersebut menggantungkan penghasilannya dari sumber daya alam yang dimilikinya. Ketergantungan tersebut disebabkan oleh adanya dorongan komersil dan penemuan minyak pada tahun 1938, sehingga banyak mengubah struktur yang ada di dalam negara, salah satunya Negara Arab Saudi. Pasca Perang Dunia II, kebutuhan terhadap minyak sangat melonjak, sehingga mencapai 70% dari jumlah konsumsi energi di dunia (Riza Sihbudi 1955, 30). Pendapatan Negara Arab Saudi sendiri banyak yang dihasilkan dari sektor minyak bumi, yaitu sekitar 70% dan Negara Arab Saudi memiliki cadangan minyak sekitar 268 barel yang dinilai cukup besar (Citra Nur Hikmah, Abrar 2019, 30). Kestabilan dari ekspor minyak Arab Saudi, membuat negara ini memiliki penghasilan yang cukup besar untuk mendukung berbagai pembangunan, seperti jalan, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, bahkan bandara.

Persediaan minyak wilayah Timur Tengah tersimpan di Arab Saudi, yang mencapai sekitar 36% (EIA (Energy Information Administration 2005)). Sebagai negara penghasil minyak terbesar, Arab Saudi menjalin kerja sama dengan berbagai negara sebagai pemasok utama minyak mentah, salah satunya kepada Negara Amerika Serikat (AS). Kawasan Timur Tengah yang terbilang strategis secara geografisnya, memiliki potensi yang sangat besar dan menguntungkan karena menghasilkan batu bara, besi, tembaga, dan minyak sebagai aset dari kawasan tersebut.

Adanya fluktuasi harga minyak yang kadang tergoncang dan tidak menentu, tentu saja mempengaruhi kestabilan perekonomian wilayah Timur Tengah, khususnya wilayah Arab Saudi. Karena sebagai sumber utama penghasilan dan sumber utama dari energi dunia, fluktuasi harga minyak ini berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi global. Hal ini juga dikarenakan banyaknya negara-negara Barat yang ketergantungan atas minyak bumi sebagai sumber energi negaranya. Sehingga, ketika Timur Tengah mengalami krisis politik, maka akan menimbulkan kekhawatiran besar bagi perekonomian global (Nosami Rikandi 2008).

Berlimpahnya minyak bumi di kawasan Arab Saudi menjadikan negara-negara tetangganya berusaha untuk menjalin kerja sama, baik kerja sama bilateral maupun kerja sama multilateral. Bukan hanya itu saja, wilayah Arab Saudi ini sangat rawan akan konflik. Hal ini dipicu karena banyaknya negara-negara yang berlomba untuk mendapatkan pengaruh di kawasan tersebut. Negara-negara tetangga yang berlomba untuk mendapatkan pengaruh akan memberikan bantuan kerja sama, salah satunya dalam bidang teknologi untuk memproduksi minyak. Namun, dengan adanya bantuan itu tentu bertujuan agar negara tersebut dapat mengakses minyak bumi dengan mudah demi kepentingan nasional negaranya sendiri (Ismah Tita Ruslin 2013, 51–52).

Sejak tahun 2014, harga minyak bumi mengalami penurunan. Kejadian inilah yang membuat Negara Arab Saudi membuat kebijakan baru untuk menghadapi keadaan tersebut. Pihak Kerajaan Arab Saudi telah memutuskan untuk membuat target pada tahun 2030 yang akan datang untuk tidak lagi terlalu bergantung kepada minyak bumi sebagai sumber penghasilan utama, karena minyak bahan bakar fosil itu dapat habis dan mengalami fluktuatif. Karena adanya ketakutan bahwa Negara Arab Saudi akan bergantung terhadap minyak bumi, maka negara tersebut berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki dan meningkatkan layanan masyarakat. Mereka meningkatkan banyak bidang, seperti bidang kesehatan, pariwisata, pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya.

Saudi Vision 2030 dalam Mengatasi Perekonomian

Kekuasaan monarki di Arab Saudi memang masih bertahan hingga saat ini. Sejak lahirnya kekuasaan dari rezim Al-Saud yang berkuasa sejak tahun 1932 hingga saat ini, menjadi landasan untuk negara-negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki sistem pemerintahan yang bersifat absolut. Akibat dari kekuasaan monarki ini, beberapa kelompok yang bertentangan melakukan berbagai gesekan sehingga terjadinya konflik, seperti *Arab Spring*, pembentukan CLDR atau disebut dengan *Committee for the Defense of Legitimate Right*, serta ARC atau *Advice and Reformation Committee*) yang dipimpin langsung oleh Osama bin Laden (Anoar Boukhars 2005, 5).

Namun dewasa ini, terjadi perubahan yang cukup signifikan pada Kerajaan Arab Saudi, yaitu dengan lahirnya kebijakan-kebijakan ke arah perubahan yang lebih moderat dibandingkan dengan kekuasaan yang sebelumnya. Hal ini menjadi langkah baru yang diusung oleh Pangeran Muhammad bin Salman al-Saud dalam *Saudi Vision 2030*, dengan tujuan untuk melepaskan adanya ketergantungan kekuasaan Negara Arab Saudi terhadap sektor minyak dan dijadikan sebagai tantangan dari adanya reformasi ekonomi di Negara Arab Saudi.

Adanya *Saudi Vision 2030* merupakan suatu langkah lebih maju Kerajaan Arab Saudi untuk mengubah kewasannya menjadi lebih modern. Ada tiga pilar yang menjadi dasar dari visi tersebut, yaitu *a vibrant society, thriving economy, dan an ambition nation* (B.A. Albassam 2011).

Terdapat kerangka baru sebagai bentuk dari transformasi negara dan langkah untuk bergeser dari zona nyaman negara yang selama ini diterima oleh masyarakat Arab Saudi. Adanya transformasi tersebut menyebabkan pengurangan beberapa fasilitas yang telah diterima masyarakat Saudi yang diakibatkan oleh turunya harga minyak dunia, hingga mengalami keanjlokkan diangka 30 dollar US per barel dari 120 dollar US per barel. Maka dari itu, sampai saat ini pun, Negara Arab Saudi telah menghabiskan banyak anggaran pembelanjaan negara sekitar hampir 10% (Carlo Sdrlevich, dkk. 2014, 18).

Adanya kebijakan *Saudi Vision 2030* menjadikan harapan baru bagi Kerajaan Arab Saudi untuk mencapai tujuan dan hasil yang lebih maju di masa depan. Dalam hal ini, Arau Saudi sendiri memiliki kemampuan untuk menggandakan perannya, dengan meningkatkan kontribusi dalam mewujudkan cita-cita masa depan, serta memberikan kesempatan kepada kaum Muslimin untuk dapat mengunjungi Ka'bah sebagai kiblatnya. Dalam tiga pilar visi Arab Saudi tercatat bahwa Negara Arab Saudi sendiri ingin melakukan kedalaman Arab dan Islam, menguatkan investasi, dan memandang penting lokasi geografis yang strategis. Arab Saudi juga akan membuka hubungan bagi sektor swasta untuk menjadi mitra, dengan memfasilitasinya dan mendorongnya terus tumbuh menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar di dunia.

Posisi Arab Saudi di dunia Islam juga akan memungkinkan untuk menjalankan peran perintis sebagai dukungan bagi bangsa Arab dan Islam. Kekuatan investasi Arab Saudi ini akan menjadi sumber kekuatan utama dalam mendiversifikasi ekonomi secara berkelanjutan. Maksud dari ketiga pilar *Saudi Vision 2030*, yaitu *pertama* masyarakat yang dinamis. Maksud dari pilar pertama ini adalah Negara Arab Saudi menginginkan pengoptimalan dengan memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Sebagai jantung dari dunia Arab dan Islam, Negara Arab Saudi dapat memperkuat dan mendorong masyarakatnya untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berpandangan moderat, bangga dengan identitas nasional, melestarikan warisan budaya kuno, membentuk lingkungan yang positif, yang kemudian didorong oleh dukungan dari keluarga yang terstruktur dengan kokoh (B.A. Albassam 2011).

Kedua, pengembangan sektor ekonomi, yaitu pada poros kedua ini Negara Arab Saudi memfokuskan untuk menyediakan peluang bagi rakyatnya dengan membangun sistem pendidikan yang berkaitan kebutuhan pasar tenaga kerja, dan mengembangkan peluang bagi pengusaha besar maupun kecil. Pemerintahan Arab Saudi juga meningkatkan produktivitas yang berkelanjutan, meningkatkan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas layanan dan pembangunan ekonomi (Muhammad bin Salman Tt).

Ketiga, ambisi nasional negara, yaitu Kerajaan Arab Saudi berupaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan seluruh jajaran birokrasinya. Dalam hal ini, Kerajaan Arab Saudi menggambarkan fitur-fitur pemerintahan yang efektif, adanya transparansi dan akuntabilitas, mendorong budaya kinerja, memberdayakan sumber daya dan energi manusia, mempersiapkan lingkungan yang diperlukan bagi warga negaranya, serta menjadikan sektor bisnis dan nirlaba sebagai pemikul tanggung jawab dalam menghadapi tantangan dan untuk merebut berbagai peluang yang ada. Pemerintahan Arab Saudi juga akan memfokuskan terhadap banyaknya kasus korupsi yang dapat menghambat program-program ini, sehingga tidak ada toleransi bagi oknum-oknum birokrasi yang telah terlibat dalam kasus korupsi (Citra Nur Hikmah, Abrar 2019, 35).

Dalam visi Arab Saudi ini juga tercatat bahwa mereka akan memanfaatkan energi dan kemampuan untuk melayani para tamu Allah SWT, yaitu peziarah yang berkunjung ke Makkah. Dalam konteks ini, Negara Arab Saudi melakukan perluasan dua masjid suci, mengembangkan bandara dan meningkatkan kapasitasnya, mereka juga meluncurkan proyek Makkah Al-Mukarramah Metro dengan dilengkapi oleh keretas situs-situs suci dan kereta Haramain. Selain itu, Arab Saudi juga memperkuat sistem jaringan transportasi untuk memfasilitasi jamaah haji dan umrah (Muhammad bin Salman tt).

Kerajaan Arab Saudi juga akan melakukan pengembangan museum. Mereka akan mendirikan museum Islam yang akan dibangun sesuai dengan standar internasional tertinggi, mengadopsi metode pengumpulan, pelestarian, tampilan, dan dokumentasi terbaru. Sehingga dapat menjadi pemberhentian utama rakyat Arab Saudi dan para peziarah, dengan tujuan untuk menjadi wahana atau wadah pembelajaran sejarah Islam kuno dan untuk menikmati pengalaman interaktif dengan materi pengantar dan berbagai kegiatan budaya.

Selain itu, pemerintahan Arab Saudi mengadakan festival dan acara-acara kebudayaan. Dalam hal ini, mereka akan memainkan peran dana pemerintah dalam berkontribusi pada pendirian dan pengembangan pusat pariwisata. Arab Saudi juga akan mendorong para investor dari dalam maupun luar negeri, menjalin kemitraan dengan perusahaan pariwisata internasional, mengalokasikan lahan yang sesuai untuk membangun proyek budaya dan hiburan, seperti perpustakaan, museum, tempat untuk teater. Hal ini dilakukan untuk memainkan siklus perekonomian dengan menyediakan banyak kesempatan kerja.

Dalam bidang pendidikan, Arab Saudi juga berusaha untuk meningkatkan peran keluarga dalam mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini, sekolah-sekolah dan orang tua akan saling bekerja sama untuk dapat berperan lebih besar, dengan tersedianya berbagai kegiatan sekolah yang meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pendidikan. Program yang diciptakan ini disebut sebagai program *Irtiqa*. Hal ini tentu saja untuk membentuk sumber daya manusia yang ada di wilayah Arab Saudi, yang nantinya akan dijadikan peluang untuk dapat bersaing di dunia internasional.

Dengan adanya program *Saudi Vision 2030* ini, diharapkan dapat membuat Negara Arab Saudi lebih mandiri dalam sektor ekonomi, perlahan melepaskan ketergantungan negara tersebut dari sumber daya alam, khususnya minyak bumi yang suatu saat nanti dapat habis dan menjadi bumerang tersendiri bagi negara itu. Ada beberapa tujuan yang dapat dirangkum dari visi tersebut, yaitu untuk menaikkan indeks modal, meningkatkan harapan hidup, menaikkan pendapatan ekonomi, sebagai alat untuk berinvestasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan.

Wahhabi dan Reformasi Saudi

Sejarah Singkat Wahhabi

Wahhabisme merupakan suatu paham dalam ajaran keagamaan yang kemunculannya pertama kali berada di Arab Saudi pada abad ke-18. Paham wahhabi ini dibawa dan dikenalkan oleh Muhammad ibn Abd al-Wahhab—salah satu ulama yang terkemuka, di mana pemikirannya dijadikan wacana yang paling dominan di seluruh jazirah Arab (Mas'odi 2020, 55). Pemikiran Muhammad ibn Abd al-Wahhab ini tidak terlepas dari latar belakang riwayat pendidikannya. Ia fokus untuk memperelajari ilmu fikih dan teologi di Makkah dan Madinah, Muhammad ibn Abd al-Wahhab juga menjadikan Ibn Taimiyah sebagai panutan dan gurunya. Sehingga, pengaruh dari pemikiran Ibn Taimiyah sangat kuat mengakar dalam pemikiran Muhammad ibn Abd al-Wahhab (John L. Esposito 2003, 59).

Paham teologi yang melekat pada gerakan al-Wahhab adalah doktrin tauhid yang sangat kuat, di mana kelompok tersebut menyebut dirinya sebagai orang-orang yang mengesakan Tuhan (John L. Esposito 2003, 59). Paham teologi inilah yang kemudian melahirkan sebuah narasi fundamental dan teraplikasikan dalam sebuah gerakan yang begitu eksklusif. Kekakuan dalam beragama dari gerakan Wahhabi ini melahirkan orang-orang yang menjadi pengikut setianya dengan mudah membid'ahkan sesuatu baru dalam praktik keberagamaan, selain itu, mereka juga akan mengharamkan praktik beragama yang dianggap bersinggungan dengan tradisi yang ada. Hal ini juga telah dikemukakan oleh Hamid Algar bahwa (2011) adanya konsep bid'ah ini dimaknai sebagai suatu perkara atau perilaku yang baru dan tidak pernah dilakukan atau diikuti oleh para sahabat, para *tabi'in*, serta bukan menjadi bagian dari hukum Islam (Hamid Algar 2011, 49–50).

Penyebaran paham-paham Wahhabi ini dilakukan oleh Muhammad ibn Abd Al-Wahhab melalui ekspansi mulai awal abad ke-19. Puncak dari ekspansi ini pada penaklukan sebagian besar wilayah Semenanjung Arab. Namun, kerajaan Wahhabiyah pertama kalinya ditaklukan oleh kekuatan Mesir pada tahun 1818 (Syamsuez Salihima 2009, 233). Dan pada saat itu, Ibu kotanya terletak di Dir'iyah, yang kemudian dihancurkan kekuasaannya, sehingga tersisa daerah Najd Selatan saja.

Pada masa awal ekspansi, gerakan Wahhabi tidak segan-segan untuk memerangi orang-orang yang menolak ajaran atau paham mereka. Sehingga, tidak sedikit orang-orang atau kelompok pada saat itu untuk menerima dan mengikuti ajaran dari gerakan Wahhabi, atau ada juga yang melarikan diri ke berbagai daerah lainnya untuk menghindari kekejaman gerakan Wahhabi saat itu (Mukti Ali 1995, 54). Sikap otoriter yang ditunjukkan oleh gerakan Wahhabi, tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai ajaran tauhid agama Islam. menurut Madawi Rasheed (2007), karakter dari gerakan ini memang otoriter, masih konservatif, bahkan sangat pasif terhadap perkembangan politik (Madawi Rasheed 2007, 5).

Penyebaran paham Wahhabi dapat dikatakan sangat cepat, karena adanya dukungan dari kerajaan Saud yang menjadi penompang gerakan ini. Muhammad ibn Saud sebagai tokoh dari Bani Saud saat itu telah menyepakati untuk bekerja sama dengan Muhammad ibn Abd Al-Wahhab dalam menyebarkan paham Wahhabi (Khaled Abou El-Fadl 2005, 7). Kemudian, dengan adanya ketetapan yang menerapkan bahwa Arab Saudi merupakan negara yang sah pada tahun 1932, gerakan Wahhabi pun ikut serta mendeklarasikan dirinya sebagai ideologi yang dianut oleh Negara Arab Saudi.

Reformasi Muhammad bin Salman

Situasi ekonomi Arab Saudi yang cukup mengkhawatirkan, menjadikan pihak kerajaan memutuskan untuk membuat kebijakan reformasi dalam sektor sosial dan ekonomi yang digagas dalam *Saudi Vision 2030*. Adapun langkah-langkah reformasi tersebut dengan dirumuskannya sektor pariwisata, keterbukaan hukum, penekanan terhadap kelompok-kelompok yang menyebarkan paham ekstimisme, pelonggaran peraturan bagi perempuan, adanya kebijakan dalam bidang pendidikan, militer, dan lain sebagainya.

Dari banyak kebijakan yang telah diusahakan oleh Kerajaan Arab Saudi, dapat disimpulkan bahwa Arab Saudi sendiri lebih mengedepankan *rational approach*, sehingga mereka akan menekankan suatu keputusan dengan melihat daya guna apa yang akan didapatkan oleh Kerajaan Arab Saudi (Ibn Syamsi 2000, 329–321). Kebijakan dari Kerajaan Arab Saudi pun dapat dikatakan bersifat objektif, walaupun pada dasarnya saat mengambil keputusan, mereka terkesan otoritatif jika kita meninjaunya dari sisi gerakan Wahhabi.

Jika ditelaah lebih lanjut, kebijakan reformasi yang diusung oleh Muhammad bin Salam di wilayah Arab Saudi masih belum terlihat jelas substansi dan haluannya, sehingga belum

adanya keputusan-keputusan yang dibuat secara kognitif. J. Reason (1990) berpendapat bahwa pada setiap pengambilan suatu keputusan, maka harus menunjukkan suatu artikulasi dengan pemilihan satu jalur keputusan yang akan diambil dari beberapa alternatif yang sudah ada.

Adanya kebijakan reformasi Arab Saudi ini berangkat dari banyaknya keresahan terhadap sektor-sektor ekonomi, khususnya minyak bumi. Sehingga, banyak peluang untuk Arab Saudi membuka kebijakan reformasi dari sektor lainnya, seperti sosial, budaya, agama, pendidikan, politik, bahkan militer. Dilihat dari *economic interest* Arab Saudi, proses reformasi ini sudah terpolarisasi kepada aspek *ideological interest* wilayah ini, dan gerakan Wahhabilah yang akan ditumbalkan oleh pihak Kerajaan Arab Saudi jika terlaksananya kebijakan reformasi Arab Saudi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan Arab Saudi terhadap beberapa elit internasional memang dipandang cukup besar.

Secara garis besar, reformasi Arab Saudi sendiri akan dihadapkan dengan sebuah kultur masyarakat yang di dalamnya sangat konservatif dan fundamentalis, baik dalam segi sosial, budaya, bahkan agama. Hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan reformasi yang diusung oleh Muhammad bin Salman dinilai bertolak belakang dengan budaya dan pikiran masyarakat di wilayah Arab Saudi.

Islam Moderat: *New Religious Movement*

Saat ini, ulama Wahhabi hanya bisa berdiam diri dan tidak dapat melakukan apa pun, karena keputusan raja telah bersifat mutlak. Sehingga, tidak ada celah untuk mereka menyangkal, menolak, atau memberikan tanggapan terhadap keputusan yang telah dibuat tersebut. Pihak kerajaan Arab Saudi telah meningkatkan pengamanan terhadap ulama-ulama yang berusaha untuk mengkampanyekan paham-paham ekstrimisme.

Paham ekstrimisme sendiri bagi kerajaan Arab Saudi menjadi salah satu paham yang menghalangi masuknya Islam moderat di wilayah Arab Saudi. Maka dari itu, pihak kerajaan akan menentang dan menindak lebih lanjut para ulama yang menyebarkan paham tersebut. Penerapan dan pembangunan visi 2030 Arab Saudi ini terkesan bahwa pihak kerajaan dengan semena-mena memanfaatkan otoritas yang dimiliki para ulama untuk menyosialisasikan visi tersebut kepada masyarakat Arab Saudi. Walaupun ada rasa keterpaksaan karena para ulama pun harus tunduk terhadap keputusan yang telah dibuat oleh pihak kerajaan, tetapi dengan kesepakatan bersama, para ulama Arab Saudi turut bekerja sama demi mewujudkan reformasi dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan bidang-bidang lainnya di wilayah Arab Saudi.

Ada beberapa ulama yang memang mengungkapkan rasa ketidaksetujuannya terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Tetapi, setelah menyatakan hal tersebut, ulama itu tidak akan diberikan ampun dan tentu dicekal langsung oleh pihak kerajaan. Salah satunya adalah beberapa ulama yang dipecat sebagai imam masjid dan ditahan karena terindikasi telah menyebarkan paham-paham ekstrimisme. Ulama-ulama tersebut adalah Syekh Awad al-Qarni, Syekh Salman al-Awda, serta saudara laki-laki keduanya yang menjadi salah satu korban di antara banyak ulama yang ditahan, dijebloskan ke penjara tanpa adanya tuntutan yang jelas secara hukum (Mahmud Hibatul Wafi 2018, 236).

Jika ditelaah lebih lanjut, posisi Wahhabi memang cukup signifikan bagi kerajaan Arab Saudi. Adanya isu untuk menerapkan paham Islam moderat yang terus berhembus ini tentu bertujuan untuk mengambil alih otoritas keagamaan Arab Saudi. Padahal, paham Islam moderat yang dicetuskan oleh Arab Saudi ini masih belum jelas konstelasinya. Tetapi, dapat dipahami bahwa pengambilan orientasi ini untuk memenggal habis paham-paham

ekstrimisme dan paham keagamaan yang sifatnya kaku di Arab Saudi yang dipakai sebagai landasan dalam beragama.

Islam moderat yang dicita-citakan Kerajaan Arab Saudi ini dapat dipahami bahwa Saudi sedang mencoba untuk menampilkan dasar baru, yaitu *new religious movement*. Menurut Clarke (2006), adanya *religious movement* ini dikarenakan oleh arus globalisasi yang sangat signifikan, sehingga agama harus menyesuaikan agar bisa beradaptasi dengan globalisasi tersebut. Maka dari itu, *new religious movement* ini dibentuk dan dikemas tidak kaku, agar lebih bersifat modern dan dapat merespons perkembangan zaman akibat dari arus globalisasi (M. Syafrizal Izaqi 2016). Maka dari itu, Kerajaan Arab Saudi memilih paham Islam moderat sebagai alternatif untuk menggantikan paham Wahhabi yang melekat di wilayah tersebut.

Kesimpulan

Paham Wahhabi yang sangat dominan di wilayah Arab Saudi berdampak pada adanya penentuan kebijakan dan regulasi Kerajaan Arab Saudi. Paham-paham yang dibawa oleh kelompok Wahhabi ini memang sangat konservatif dan fundamentalis, sehingga mampu merekonstruksi berbagai sektor di Negara Arab Saudi, seperti sektor budaya, agama, bahkan sosial. Dengan adanya kebijakan yang digagas oleh Muhammad bin Salman dalam *Saudi Vision 2030* dengan tujuan untuk mempertahankan dan menaikkan sektor ekonomi Kerajaan Arab Saudi dianggap sedikit bertentangan dengan paham yang dibawa oleh kelompok Wahhabi. Karena dalam visi tersebut, Muhammad bin Salman menggagas banyak perubahan, seperti perubahan dalam sektor ekonomi, pariwisata, budaya, sosial, bahkan Muhammad bin Salman ingin menerapkan sistem Islam moderat dalam praktik keberagaman masyarakat Arab Saudi.

Daftar Pustaka

- Anis Rosida. 2018. "Wacana Modernisasi dalam Tantangan Peradaban, Peran Perempuan Sebagai Tonggak Sejarah Arab Saudi." *Jurnal Palita: Journal of Social-Religion Research* 3 (1).
- Anoar Boukhars. 2005. "Crisis of Legitimacy in Saudi Arabia." Dalam . Nevada: Presented at International Studies Association.
- B.A. Albassam. 2011. "Political Reform in Saudi Arabia: Necessity or Luxury" 3 (6).
- Carlo Sdravovich, dkk. 2014. *Subsidy Reform in The Middle East and North Africa: Recent Progress and Challenges Ahead*. Washington, D.C: IMF.
- Citra Nur Hikmah, Abrar. 2019. "Saudi Vision: Reformasi Ekonomi Arab Saudi." *Jurnal Periode: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 1 (1).
- E. Gearon. 2016. *Turning Points in Middle Eastern History*. Virginia: The Great Courses.
- Ecaterina MATOI dan Diana-Monica CONSTANTIN. 2019. "Muhammad Bin Salman's Reforms VS Wahhabi Rules: A Challenge for the Status Quo of the Saudi State?" Dalam . Bucharest: The Complex and Dynamic Nature of the Security Environment.
- EIA (Energy Information Administration. 2005. "Saudi Arabia Country Analysis Brief." Washington, D.C, USA: Country Analysis Briefs. <http://energybc.ca/cache>

- /peak/web.archive.org/web/20070412143230/http_/www.eia.doe.gov/cabs/saudi.html.
- . 2017. “Total Petroleum and Other Liquids Production – 2017.” Washington, D.C: Country Analysis Briefs. <https://www.eia.gov/beta/international/index.cfm?topL=exp>.
- Francois Bourricaud. 1984. *The Sociology of Talcott Parsons*. Chicago: Chicago University Press.
- Hamid Algar. 2011. *Wahabisme: Sebuah Tinjauan Kritis*. Jakarta: Democracy Project.
- Ibn Syamsi. 2000. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismah Tita Ruslin. 2013. “Memetakan Konflik di Timur Tengah.” *Jurnal Politik Profetik* 1 (1).
- J. Wagemakers. 2012. “The Enduring Legacy Of The Second Saudi State: Quietist And Radical Wahhabi Contestations of Al-Wala Wa-L-Bara.” *Cambridge University Press: International Journal of Middle East Studies* 44 (1).
- John L. Esposito. 2003. *Unholy War*. Yogyakarta: LKiS.
- J.T Reason. 1990. *Human Error*. New York: Cambridge University Press.
- Khaled Abou El-Fadl. 2005. *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. San Fransisco: Harper Publisher.
- M. Syafrizal Izaqi. 2016. “Pengaruh Kelompok Wahabi Terhadap Politik Luar Negeri Arab Saudi Dalam Arab Spring di Mesir Tahun 2011-2013.” *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 5 (2).
- Madawi Rasheed. 2007. *Contesting the Saudi State: Islamic Voices from a New Generation*. New York: Cambridge University Press.
- Mahmud Hibatul Wafi. 2018. “Diskursus Reformasi Arab Saudi: Kontestasi Kerajaan Saudi dan Wahabi.” *Journal Islamic World and Politics* 2 (1).
- Mas’odi. 2020. “Wahhabisme vis-a-vis Reformasi Arab Saudi: MBS, Agensi, Moderasi, dan Diversifikasi Ekonomi.” *Jurnal Al-Irfan* 3 (1).
- Muhammad bin Salman. Tt. “نص رؤية المملكة العربية السعودية 2030.” Arab Saudi.
- Mukti Ali. 1995. *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*. Jakarta: Djambatan.
- Nosami Rikandi. 2008. “Mendektesi Pengaruh Pasar Minyak Dunia Terhadap Krisis Harga.” *Jurnal Akuntansi Bisnis* 1 (1).
- Panji Haryadi. 2018. “Peran Muhammad bin Salman terhadap Perubahan Pilar Kenegaraan Arab Saudi.” *Jurnal ICMES* 2 (1).
- Peter B. Clarke. 2006. *New Religious in Global Perspective: A Study of Religions Change in The Modern World*. New York: Routledge.
- Riza Sihbudi. 1955. *Profil Negara-negara Timur Tengah*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- S. Stenslie. 2018. *The End of Elite Unity and the Stability of Saudi Arabia*. The Washington Quarterly: Spring.

Simon Henderson. 1994. "After King Fahd: Succession In Saudi Arabia." *The Washington Institute for Near East Policy*, 1 September 1994, Policy Papers 37 edisi. <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/after-king-fahd-succession-saudi-arabia-2nd-ed>.

Syamsuez Salihima. 2009. "Muhammad ibn Abdul Wahab 1703-1791 (Sejarah dan Perjuangannya)." *Jurnal Adabiyah* IX (2).